



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **YANTI HERMAN**
2. Jabatan : **DIREKTUR**
3. NHK : **487676**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	4.720.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 190 m2/88 m2 di KAB / KOTA BANDUNG BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 220 m2/171 m2 di KAB / KOTA BANDUNG BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 2.300.000.000		
3. Tanah dan Bangunan Seluas 185 m2/48 m2 di KAB / KOTA BANDUNG BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000		
4. Bangunan Seluas 43 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 720.000.000		
5. Bangunan Seluas 29 m2 di KAB / KOTA SUMEDANG, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	251.500.000
1. MOTOR, HONDA NF 11B2D1 M/T Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000		
2. MOBIL, HONDA HR-V Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	25.500.000
D. SURAT BERTHARGA	Rp.	73.075.000
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	124.708.665
F. HARTA LAINNYA	Rp.	40.000.000
Sub Total	Rp.	5.234.783.665



III. HUTANG

Rp. 2.821.954

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 5.231.961.711

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.